PENGARUH PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG

(The Influence Of The Role of The School Committee on The Quality of Elementary School Education in Kelapa Dua District, Tangerang District)

Siva Fauzia
Program Studi Teknologi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7772210003@untirta.ac.id
Sudadio, Suherman
Program Studi Teknologi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

The subpar quality of education in Indonesia can be attributed to the lack of community involvement in educational programs, which is the primary focus of this research. The responsibility of formulating policies that align with the school's vision and goals to facilitate an environment conducive to learning falls on the shoulders of the educational institution's principal. Additionally, the principal and school committee must address the shortage of necessary infrastructure and facilities required to support daily operations. Without community engagement, schools will struggle to provide activities that aid student learning. Community participation in school policies can result in both short and long-term benefits for the community. The school committee serves as an important partner, bringing valuable perspectives from the community into operational policies, educational programs, and school management. This study aims to investigate the impact of the committee's role in improving the quality of elementary education in Kelapa Dua District, Tangerang Regency, by examining and explaining its influence. The main focus of this investigation is to assess how much influence the school committee has on the caliber of elementary education in the Kelapa Dua District of Tangerang Regency. One public elementary school in the region was identified as having inadequate education and an ineffective committee. The ex post facto quantitative approach was utilized to tackle this dilemma, with a total of 23 public elementary schools and 292 teachers in the population. The Proportional Random Sampling method was used to select a sample of 74 individuals. Data was obtained through questionnaires, and hypotheses were established and examined using Regression Analysis via IBM SPSS Statistics 22. The analysis indicates that the school committee's involvement is critical in determining education quality, as demonstrated by a correlation coefficient of 0.664 or 66.4%.

Keywords: Role of the School Committee, Quality of Education

Abstrak

Indonesia telah mengalami penurunan kualitas pendidikan karena berkurangnya keterlibatan masyarakat dengan program pendidikan. Sebagai kepala lembaga pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang selaras dengan visi dan tujuan sekolah, memastikan penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif. Penyelesaian masalah seperti kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang menghambat operasional sekolah membutuhkan kerjasama yang erat antara komite sekolah dan kepala sekolah. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan upaya pendidikan yang menumbuhkan pembelajaran. Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan sekolah membawa manfaat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang bagi semua pemangku kepentingan. Komite berfungsi sebagai mitra sekolah dan memberikan umpan balik yang mewakili pandangan dan keinginan masyarakat tentang manajemen sekolah, program pendidikan, dan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan peran panitia dalam peningkatan mutu pendidikan dasar di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komite sekolah terhadap mutu pendidikan dasar di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Keputusan untuk berkonsentrasi pada sekolah dasar negeri di wilayah ini dibuat karena tingkat keterlibatan komite dan kualitas pendidikan yang tidak memadai. Untuk studi ini, pendekatan kuantitatif ex-post facto digunakan, yang melibatkan sampel 74 orang dari populasi 23 sekolah dasar negeri dan 292 guru, dipilih melalui teknik Proportional Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hipotesis ditetapkan dan diuji melalui Analisis Regresi dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 22. Berdasarkan hasil temuan, terdapat korelasi yang kuat antara peran komite sekolah dengan mutu pendidikan, dengan koefisien korelasi sebesar 0,664 atau setara dengan 66,4%.

Kata Kunci : Peran Komite Sekolah, Mutu Pendidikan

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia ingin melengkapi sistem pendidikan mereka dengan lebih baik, sehingga mereka membuat undang-undang – UU 32 Tahun 2004. Undang-undang ini mengalihkan sebagian kewenangan dari tingkat federal ke organisasi daerah, khususnya di bidang pembelajaran. Itu adalah langkah besar untuk memperbaiki lanskap pendidikan di Indonesia. Desentralisasi ini memberdayakan pemerintah daerah untuk melakukan inisiatif khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing. Inisiatif tersebut antara lain memprioritaskan pembangunan sekolah dengan menitikberatkan pada penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, seperti tenaga administrasi, kepala sekolah, fakultas, siswa, dan pengelolaan keuangan.

Penyelenggaraan pendidikan luar biasa difasilitasi dengan penggunaan komponen pendukung yang bertindak sebagai perantara. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya lulusan yang memiliki kompetensi dan kemampuan unggul di bidang pilihannya. Persentase lulusan yang melanjutkan pendidikan lanjutan dan lulus penilaian ketat di bidang keahliannya merupakan faktor penentu kualitas pendidikan. Kelancaran fungsi sekolah memerlukan kerja sama dan koordinasi di antara berbagai komponennya. Keterlibatan yang konsisten dari komite sekolah terpadu sangat penting dalam memberikan pendidikan yang luar biasa dan unggul.

Untuk mencapai standar akademik yang lebih tinggi, sangat penting untuk memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Partisipasi dalam komite sekolah sangat penting untuk mengembangkan infrastruktur tersebut. Penting untuk menjaga fasilitas pendidikan tetap mutakhir dan sejalan dengan standar pendidikan terkini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pasal 35 UU Sisdiknas tahun 2003 memperjelas bahwa anggota masyarakat memiliki kepentingan dalam pendidikan – mereka tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya. Ini perintah yang sulit, pasti; tapi satu yang penting untuk hasil pendidikan yang optimal.

Memperoleh pengetahuan dan pendidikan yang layak bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Butuh waktu, tenaga, dan persiapan. Tanggung jawab juga ada pada dewan administrasi untuk memastikan mereka menyediakan sumber daya yang diperlukan– seperti infrastruktur dan kebutuhan fisik– untuk membantu siswa mencapai tujuan

pendidikan mereka secara tepat waktu. Tanggung jawab ini terutama terletak pada administrasi sekolah, terutama dalam hal memperoleh sumber daya yang memfasilitasi pembelajaran. Kualitas infrastruktur dan sumber daya pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap dorongan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan mendorong pendidik untuk mengadopsi teknik pedagogis yang efektif.

Proyek ini menggali jauh ke dalam keterlibatan masyarakat dengan UU No. 20 Tahun 2003, yang mengatur tentang pendidikan nasional. Hal ini memungkinkan orang untuk menjadi bagian dari proses pembuatan, peluncuran, pengukuran dan penilaian program pendidikan. Pasal 9 mengatakan masyarakat harus menyediakan bahan untuk mewujudkannya. Tapi apa yang kami temukan bahkan lebih menarik. Keputusan hukum ini menekankan peran pemerintah dalam menangani masalah pengelolaan keuangan di sektor pendidikan. Untuk membuat kerangka implementasi, pemimpin pendidikan harus mengadopsi tujuan pendidikan sebagai prinsip panduan, memastikan pencapaian hasil akademik yang diinginkan secara efektif, seperti meningkatkan kualitas pengajaran. Sangat penting bagi kepala sekolah dan komite untuk bergabung jika kita ingin mengatasi krisis pendidikan karena bekal yang tidak memadai. Lagi pula, mereka adalah bagian utama dari teka-teki dalam hal meningkatkan hasil pendidikan. Kami membutuhkan partisipasi mereka dalam inisiatif yang dimaksudkan untuk membentengi institusi pembelajaran. Inklusi masyarakat juga harus menjadi bagian dari rencana; masukan mereka dapat memiliki efek yang tak ternilai dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Komite berfungsi sebagai entitas all-in-one ketika datang ke tempat akademik, yang membuka jalan bagi pandangan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, kurikulum dan organisasi sekolah. Tujuannya untuk mengkaji dan mengartikulasikan bagaimana peran komite sekolah terhadap mutu pendidikan dasar di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

B. KAJIAN TEORITIK

1. Peran Komite Sekolah

Menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat dikaitkan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pendidikan. Tanggung jawab terselenggaranya pendidikan yang efektif dan efisien ada pada kepala sekolah yang harus menetapkan kebijakan yang sejalan dengan visi dan tujuan sekolah. Untuk mengatasi kendala seperti

kurangnya sarana dan prasarana yang menghambat operasional sekolah, diperlukan kerjasama antara komite sekolah dan kepala sekolah. Tanpa dukungan masyarakat, sekolah tidak dapat melaksanakan kegiatan yang meningkatkan pembelajaran secara efektif. Melibatkan masyarakat dalam kebijakan sekolah, program pendidikan, dan manajemen dapat membawa manfaat jangka pendek, menengah, dan panjang. Komite sekolah bertindak sebagai mitra sekolah, memberikan masukan berharga yang mencerminkan suara dan kehendak masyarakat. Analisis ini berfokus pada dampak peran komite terhadap mutu pendidikan dasar di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Studi ini menjawab pertanyaan sentral apakah komite sekolah berdampak pada kualitas pendidikan dasar di daerah tersebut. Proses pemilihan sekolah dasar negeri di wilayah ini didasarkan pada partisipasi komite yang mematuhi standar yang ditetapkan, serta standar pendidikan secara keseluruhan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, khususnya penelitian ex post facto. Populasi penelitian meliputi 23 sekolah dasar negeri dan 292 guru, sedangkan 74 orang dipilih melalui teknik Proportional Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Melalui penggunaan Analisis Regresi dalam IBM SPSS Statistics 22, hipotesis diuji. Analisis yang dihasilkan menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara peran komite sekolah dengan mutu pendidikan, dengan koefisien korelasi sebesar 0,664 yang berarti korelasi sebesar 66,4%.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan peningkatan kualitas pendidikan sebagai perhatian utama. Indikasi yang jelas akan hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan desentralisasi tanggung jawab khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan penekanan khusus pada bidang pendidikan. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing. Langkah-langkah tersebut meliputi pengutamaan kemajuan sekolah, dengan perhatian khusus pada pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana. Ini termasuk staf administrasi, kepala sekolah, staf pengajar, siswa, dan manajemen keuangan.

Bukti menunjukkan bahwa implementasi faktor pendukung berperan sebagai mediator dalam produksi pendidikan luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya lulusan yang telah memperoleh keterampilan dan bakat untuk bersaing di

bidangnya. Kualitas pendidikan dapat diukur dengan proporsi lulusan yang dapat dengan mulus maju ke tingkat pembelajaran yang lebih tinggi dan secara efektif menavigasi evaluasi yang ketat di bidang keahlian mereka. Kelancaran fungsi sekolah bergantung pada interaksi yang harmonis dari komponen-komponen ini. Upaya kohesif dari komite sekolah terpadu merupakan faktor penting dalam mencapai pendidikan yang unggul kualitas.

2. Mutu Pendidikan

Peran serta komite sekolah sangat menentukan terciptanya sarana dan prasarana yang memadai dan menunjang keberhasilan pembelajaran. Ini, pada gilirannya, menghasilkan pembentukan standar akademik yang lebih tinggi. Penyediaan fasilitas pendidikan modern yang sesuai dengan standar pendidikan sangat penting untuk mencapai hasil yang sangat baik untuk kualitas pendidikan di sekolah, sebagaimana diatur oleh UU No. 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 35 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, menjadi tanggung jawab masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian penyelenggaraan pendidikan. Tindakan mencari pendidikan dan memperoleh pengetahuan adalah usaha sadar dan ditentukan, memerlukan perencanaan yang cermat. Secara bersamaan, keberhasilan pelaksanaan rencana ini sangat bergantung pada tanggung jawab dewan pendidikan untuk segera menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk infrastruktur dan sarana fisik. Administrasi sekolah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas ini, khususnya dalam hal menyediakan sumber daya yang membantu pembelajaran. Kualitas infrastruktur dan sumber daya pendidikan memainkan peran penting dalam memicu motivasi siswa untuk memperoleh pengetahuan dan menginspirasi guru untuk menggunakan metode pedagogis yang efektif.

Memiliki jumlah siswa yang bervariasi biasanya berarti bahwa lembaga pendidikan memiliki kebutuhan khusus – terutama dalam hal menyediakan pendidikan terbaik. Dan persyaratan ini bisa sangat mahal. Itulah mengapa memiliki banyak aliran pendapatan sangat penting untuk memastikan mereka dapat memberikan layanan pendidikan berkualitas tinggi tanpa hambatan. Selain itu, lembaga pendidikan didesak untuk melihat kemungkinan bisnis yang berbeda untuk menambah pendapatan mereka. Untuk mencapai misi ini, sangat penting bagi perusahaan-perusahaan ini untuk mempertahankan

manajemen fiskal yang bertanggung jawab dan menciptakan aliran pendapatan yang berkelanjutan dan jujur. Sayangnya, stabilitas keuangan lembaga pendidikan sangat terpengaruh pada pergantian abad ke-21 – secara langsung atau tidak langsung. Ketika institusi perlu mendapatkan koin, mereka mencari bantuan ke mana-mana. Itu bisa jadi Paman Sam, bisnis lokal, perusahaan non-pendidikan, komite sekolah, hibah industri (asalkan lulus tes mengendus hukum), penyedia pendidikan dan bahkan masyarakat luas.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan umum metodologi penelitian ini adalah kuantitatif, dengan menggunakan desain ex-post facto sebagai kerangka kerjanya. Berbeda dengan metode penelitian lainnya, metodologi jenis ini tidak memanipulasi variabel, melainkan mengukur fenomena yang ada di antara partisipan penelitian untuk mengungkap informasi faktual. Pembelajaran akan dilakukan di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Kelapa Dua yang terletak di Kabupaten Tangerang. Sifat sistematis dan empiris dari metodologi Ex Post Facto adalah motivasi di balik penggunaannya dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk secara retroaktif mengidentifikasi faktor penyebab dan menyelidiki peristiwa masa lalu. Keputusan untuk menggunakan metodologi ini selaras dengan tujuan penelitian, terutama dalam menentukan tingkat dampak antar variabel yang diteliti. Aspek penting dalam melakukan penelitian adalah penentuan ukuran sampel yang diperlukan. Hal ini melibatkan pengukuran ukuran sampel dan jaminan bahwa sampel merupakan perwakilan yang wajar dari karakteristik populasi. Untuk studi khusus ini, metodologi Proportional Random Sampling digunakan, yang merupakan evolusi dari metode Stratified Random Sampling. Metodologi melibatkan pemilihan ukuran sampel di setiap strata yang sebanding dengan ukuran populasi strata tertentu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Peran Komite Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan

Penyelidikan baru-baru ini terhadap keuntungan pendidikan komite sekolah menyimpulkan bahwa mereka berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Temuan tersebut didukung oleh data dan analisis yang menunjukkan koefisien determinasi (R Square) sebesar 66,4% dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa kepanitiaan memiliki pengaruh yang tidak dapat disangkal terhadap perbaikan

pendidikan sebesar 66,4%. Ditambah lagi, investigasi juga menemukan hubungan positif antara keterlibatan komite dan standar sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Komite sekolah memiliki banyak sekali daftar peran yang harus diisi. Ini termasuk memberikan rekomendasi tentang masalah pendidikan, memastikan sumber daya seperti uang, kecerdasan, dan tenaga siap digunakan dalam pengajaran, dan memastikan bahwa pemerintah dan warga negara tetap mengetahui perkembangan pendidikan. Selain itu, ia berfungsi sebagai perantara antara legislator, otoritas, dan publik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suwanto et al (2019), terdapat hubungan yang sangat besar antara keterlibatan kepala sekolah dan komite sekolah dengan kualitas pendidikan di SMP Negeri di Kabupaten Rokan Hilir. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa 90% dari perbedaan standar pendidikan disebabkan oleh partisipasi kepala sekolah, sedangkan 58,3% disebabkan oleh aktivitas komite sekolah. Pada akhirnya, tampaknya meningkatkan tugas kedua entitas akan memberikan efek yang sangat positif pada kualitas pengajaran. Kekuatan gabungan dari kedua otoritas sekolah diperkirakan mencapai 90,4%.

Penelitian ini mendukung gagasan bahwa komite sekolah adalah entitas mereka sendiri, yang bekerja untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan memberikan kualitas dan partisipasi yang tinggi. Meliputi PAUD dan pendidikan tinggi, kelompok mandiri ini bertugas membimbing fakultas, membangun infrastruktur dan mengelola sumber daya. Plus, tim-tim ini mengambil tugas untuk memastikan tingkat operasional telah terpenuhi ketika datang ke program pendidikan tertentu.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Tingkat mutu pendidikan dipengaruhi oleh tanggung jawab komite sekolah, dan hal ini dapat berdampak positif sampai batas tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara tingkat keterlibatan komite sekolah dan standar dasar pendidikan di Kelapa Dua dan Tangerang, yang menghasilkan hasil yang signifikan dan menguntungkan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa komite sekolah yang berada di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang memiliki andil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Oleh karena itu, adalah penting untuk memberikan

lebih banyak kewenangan kepada komite-komite ini untuk membantu mereka dalam upaya mereka meningkatkan standar penyelenggaraan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hadis, Nurhayati Bawa. 2014. Manajemen Mutu Pendidikan,cendikiawan. Bandung, Alfabeta

Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. SAP (Susunan Artikel Pendidikan), 2(1), 12–21. https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156

Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Dewi, R., & Khotimah, S. H. (2020). Pengaruh Profesionalisme Dan Disiplin Kerja Guru Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar. *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal*, *8*(2), 279.

Fadhilah, N., & Afriansyah, H. (2019). Pendidikan Formal Berbasis Manajemen Mutu Sekolah (Total Quality Management).

Hasanah, N. (2016). Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa. Thesis. Pasce Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Hooge, Edith dan Marlies Honingh. 2014. Are School Boards aware of the educational quality of their schools. Educational Management Administration & Leadership, 42 (45), 139-154. DOI: 10.1177/1741143213510509

Jafri D, Novianty, dan Rahmat Abdul Bawahi. 2017. Manajemen Mutu Terpadu. Yogyakarta, Zahir Publising

Kauko, Jaakko, *et al.* 2016. The emergence of quality assessment in Brazilian basic education. European Educational Research Journal, 15 (5), 558-579. DOI: 10.1177/1474904116662889

Kemendikbud RI.(2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.75 tahun 2016. tentang Komite Sekolah.

Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, tentang acuan pembentukan komite sekolah(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 Komite Sekolah

Kuntoro, A. T. (2019). Manajemen Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan*, *7*(1), 84-97.

Lian, B. (2021, July). The Influence of School Committees and School Principals Leadership on the Quality of Education. In *International Conference on Education Universitas PGRI Palembang (INCoEPP 2021)* (pp. 784-787). Atlantis Press.

Ningsih, K. D., Harapan, E., & Destiniar, D. (2021). Pengaruh komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, *6*(1), 1-14.

Nonik. (2014). Peran Komite Sekolah dalam Membangun Kewirausahaan (Studi Kasus di SMK Sunan Drajat Paciran Lamongan). Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, Vol.3 (3) Januari 2014. Hal: 100-113.

Nurafni, K., Saguni, F., & Hasnah, S. (2022). Pengaruh Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, *1*(1), 44-68.

Putri, Y. (2019). Upaya Peningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah.

Rabiah, S. (2019). Manajemen Pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Sinar Manajemen*, *6*(1), 58-67.

Sayuti, A. (2022). Peran Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal*

Sudadio. (2015). Esensial Manajemen Peningkatan Mutu Terpadu Jasa Pendidikan. Serang: Untirta Press.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Suwanto, S., Makhdalena, M., & Azhar, A. Pengaruh Peran Kepala Sekolah Dan Komite Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan Pada Smp Negeri di Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif*, *2*(2), 303-313.

Yuliana, E. Y., & Brata, Y. R. (2019). Kinerja Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan pada Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, *3*(1), 41-47.